



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa hasil pembahasan berupa Rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 2 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang sebagai bahan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota.
- KETIGA : Pokok-pokok Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 3 Mei 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name Budi Prayitno.

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018

POKOK-POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

1. **TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

- Perlu disajikan dalam dokumen LKPJ, faktor pendorong dan penentu keberhasilan atas semakin membaiknya kondisi ekonomi makro dan sosial Kota Magelang tahun 2018, sehingga prestasi ini dapat dipertahankan dan tentu di tingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
- Strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin agar terus disempurnakan, dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya capaian penurunan angka kemiskinan dapat lebih progresif, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun dapat terwujud.
- Untuk peta data kemiskinan dapat dibuat per-kelurahan/per-kecamatan sehingga dapat lebih jelas dan dapat diverifikasi, guna memudahkan dalam intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan agar program/kegiatan semakin efektif dan tepat sasaran.
- Perlu adanya perbaikan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat guna mewujudkan Agenda pembangunan Global Pasca 2015 yang termaktub dalam SDGs (Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030.

2. TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

- Kepada seluruh perangkat daerah untuk lebih bekerja keras agar serapan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2 tahun kedepan meningkat pada level diatas 95% dari alokasi.
- Atas penurunan Silpa tahun 2018 ini berarti bahwa, pemerintah daerah sudah mulai menemukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah dan mampu memperbaiki sedikit manajemen kas dalam pengelolaan program dan kegiatan di tahun 2018. Untuk itu direkomendasikan agar:
 1. Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun berikutnya.
 2. Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk *punishment* bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
 3. Koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah agar terus dilakukan mengingat implementasi peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran.
 4. Agar terus dilakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2018 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.
- dalam menyelesaikan masalah piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2017 agar dilakukan secara intens dan progress capaiannya secara kontinu dilaporkan pada DPRD.

3. TERHADAP EVALUASI KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN MISI DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

- Agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun keempat RPJMD 2016-2021 maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan tahun 2019, sebagai tahun keempat RPJMD di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target.
- Masing-masing komisi untuk dapat mendiskusikan bersama dengan OPD mitra kerja yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang pada tahun 2018 belum mencapai target RPJMD. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa masalah dan hambatan serta penyebab target pada indikator tersebut tidak tercapai, kemudian hasilnya untuk menjadi dasar perbaikan manajemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan akan lebih efektif memenuhi target sasaran pembangunan.
- Untuk indikator kinerja baik indikator tujuan maupun indikator sasaran yang sampai dengan tahun 2018 targetnya sudah tercapai/terlampau, agar tidak terjadi kemunduran kualitas perencanaan pembangunan, maka, jika dari sisi efektifitas (waktu) tidak memungkinkan melakukan perubahan RPJMD, hendaknya pada RKPD perubahan 2019 dan RKPD 2020 serta RKPD 2021 target kinerjanya dapat di tingkatkan melebihi RPJMD yang sekarang masih berlaku. Namun jika masih memungkinkan disarankan untuk merubah RPJMD. Dengan demikian kualitas perencanaan daerah akan semakin lebih maju, realistis, sesuai kebutuhan dan akuntabel.
- Untuk target kinerja sasaran yang diprediksi pesimis akan dicapai pada tahun akhir 2021 maka, dapat didiskusikan bersama antara OPD yang bertanggungjawab terhadap target kinerja tersebut dengan komisi DPRD yang membidangnya sehingga ditemukan strategi program dan kegiatan beserta pendanaannya yang lebih efektif untuk mencapainya.

- Agar percepatan pembangunan pada tiap-tiap aspek misi daerah seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD untuk terus ditingkatkan sehingga target indikator tujuan maupun sasaran seluruh misi daerah pada tahun akhir RPJMD yaitu tahun 2021 seluruhnya dapat dicapai.

4. TERHADAP EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

- Pemerintah daerah untuk dapat menganalisa penyebab/akar permasalahan atas predikat cukup pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum
- Setelah ditemukan akar permasalahannya kemudian di susun solusinya sehingga pada paruh waktu Tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 target kinerja berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum dapat terpenuhi

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 3 Mei 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO